



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023



www.dishub.purwakartakab.go.id

Jl. Veteran No. 1 Kabupaten Purwakarta

KATA PENGANTAR

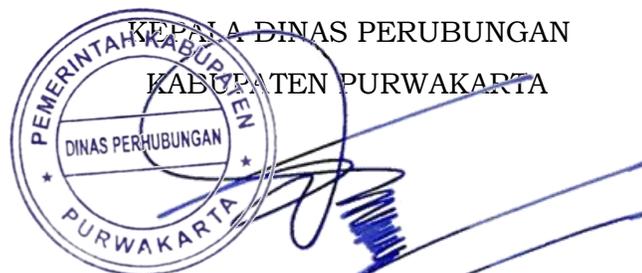
Puji Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023.

Penyusunan rencana kerja perubahan ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Murni Tahun 2023, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program kegiatan Masyarakat dan program pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di tahun-tahun mendatang. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 13 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA

The image shows a circular official stamp of the Purwakarta District Transportation Office. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA' around the perimeter and 'DINAS PERHUBUNGAN' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST.,MM

NIP. 197202282003121003

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAN	9
Memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun berjalan sampai Triwulan III, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan (Tabel Evaluasi Triwulan III)	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	18
Mengemukakan Rioritas Pembangunan dan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tab Matrik	20
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun anggaran 2023.

Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memandang perlu melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2023. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melaksanakan perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. Penyesuaiaan Kebijakan Umum Anggaran, berdasarkan hasil realisasi anggaran sampai dengan semester 2;
2. Hasil proyeksi pendapatan daerah dan Kebutuhan Belanja Daerah untuk semester 2 ;
3. Permankeu No.212/PMK.07/2022 ttg indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 ;
4. Penyesuaian Kegiatan/Subkegiatan dari DAK dan bankeu Provinsi Tahun 2023;
5. Penyesuaian indikator, target dan pagu pada sub kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas PD ;
6. Penyesuaian agar memperhatikan dan memprioritaskan subkegiatan yang mendukung/mendrongkak pencapaian indikator program (IKK).

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat

- (1)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2)Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD.
- (3)Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan daerurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat dilakukan tanpa melaluia tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan daerurat, keadaan lura biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 91) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perubahan :
 - a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah ;
 - b. Target sasaran Pembangunan Daerah ;
 - c. Prioritas Pembangunan Daerah ;
 - d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;

- e. Target Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubagan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPDP Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Renja-PD Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2023;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan melalui capaian target program dan kegiatan pembangunan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, landasan hukum pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAN

Memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun berjalan sampai Triwulan III, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan (Tabel Evaluasi Triwulan III)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan Rioritas Pembangunan dan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif pada perubahan dan disajikan dalam Tab Matrik

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN BERKENAAN DINAS
PERHUBUNGAN

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian kinerjanya di tahun berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, dengan adanya evaluasi ini akan diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu sehingga akan dicapai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di tahun berikutnya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta juga harus dilaksanakan evaluasi. Karena pada pembuatan Rencana Kerja ini pada Januari 2023, oleh karena itu yang disajikan merupakan perkiraan realisasi tahun 2023 Triwulan III sebagaimana tersebut dalam T-C29 terlampir:

Tabel 2.1 T-C.29

EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN III DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

KODE						PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR (sesuai RPJMD dan DPA)	APBD PARSIAL (sesuai DPA)			REALISASI TRIWULAN III TAHUN 2023			SELISIH		CATATAN PERMASALAHAN
								Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu	Pagu	%	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10= (6-9)		11
2	15					DINAS PERHUBUNGAN			28.024.752.638	PWK						
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.981.156.838	PWK			12.947.260.407	6.033.896.431	68,21 %	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49.827.700	PWK			14.710.200	35.117.500	29,52 %	
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	PWK	3 Dok	13.735.900	PWK	-	0	13.735.900	0 %	
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PWK	1 Dok	9.999.700	PWK	-	0	9.999.700	0 %	
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PWK	1 Dok	9.973.900	PWK	-	0	9.973.900	0 %	
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	1 Dok	9.924.000	PWK	1 dok	9.924.000	0	100 %	
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	1 Dok	6.194.200	PWK	1 dok	4.786.200	1.408.000	77,27 %	
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.904.919.007	PWK			7.736.200.088	3.168.718.919	70,94 %	
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah Gaji dan tunjangan ASN	PWK	14 bln	10.894.970.707	PWK	11 bln	7.726.274.688	3.168.696.019	70,92 %	
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tersedia	PWK	1 Dok	9.948.300	PWK	1 dok	9.925.400	22.900	99,77 %	

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2023

						SKPD										
2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.358.400	PWK		0	10.358.400	0 %	
2	15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PWK	15 Dok	10.358.400	PWK	-	0	10.358.400	0 %	
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				364.640.000	PWK		294.859.000	69.781.000	80,86 %	
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PWK	256 orang	249.700.000	PWK	256 orang	248.750.000	950.000	99,62 %	
2	15	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PWK	10 bln	24.940.000	PWK	7 bln	19.270.000	5.670.000	77,27 %	
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PWK	3 paket	90.000.000	PWK	1 paket	26.839.000	63.161.000	29,82 %	
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				912.152.634	PWK		562.482.841	349.669.793	61,67 %	
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	PWK	15 unit	25.873.600	PWK	10 unit	19.726.300	6.147.300	76,24 %	
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	PWK	205 pcs	13.550.500	PWK	205 pcs	13.550.500	0	100 %	
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	PWK	34 item	49.999.500	PWK	34 item	23.141.000	26.858.500	46,28 %	
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik	PWK	6 paket	517.193.034	PWK	6 paket	349.812.871	167.380.163	67,64%	
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Tersedianya bahan cetakan penggunaan	PWK	1 paket	100.000.000	PWK	1 paket	78.408.800	21.591.200	78,41 %	
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PWK	12 bln	14.400.000	PWK	8 bln	6.080.000	8.320.000	42,22 %	
2	15	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	PWK	1 paket	25.141.000	PWK	-	0	25.141.000	0 %	
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PWK	12 bln	124.995.000	PWK	8 bln	71.763.370	53.231.630	57,41 %	
2	15	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arsip	PWK	1 paket	25.000.000	PWK	-	0	25.000.000	0 %	

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2023

2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PWK	2 paket	400.000.000	PWK	2 paket	397.767.200	2.232.800	99,44 %	
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ)			8.943.459.900	PWK			2.507.997.735	6.435.462.165	28,04 %	
2	15	02	2	01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			420.116.000	PWK			4.992.000	415.124.000	1,19 %	
2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	PWK	1 dok	420.116.000	PWK	-	4.992.000	415.124.000	1,19 %	
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			5.605.207.000	PWK			241.546.800	5.363.660.300	4,313 %	
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	PWK	71 unit	254.420.000	PWK	71 unit	235.831.700	18.588.300	92,69 %	
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	PWK	47 unit	5.183.804.600	PWK	-	2.174.600	5.181.630.000	0,04 %	
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	PWK	65 unit	166.982.500	PWK	-	3.540.500	163.442.000	2,12 %	
2	15	02	2	03		Pengelola Terminal Penumpang Tipe C			113.630.000	PWK			80.030.000	33.600.000	70,43 %	
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan SDM pengelola terminal Tipe C yang terpenuhi	PWK	28 orang	113.630.000	PWK	28 orang	80.030.000	33.600.000	70,43 %	
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			199.999.400	PWK			199.988.100	11.300	99,99 %	
2	15	02	2	04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	PWK	1 dok	119.999.700	PWK	1 dok	119.999.700	0	100 %	
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	PWK	1 laporan	79.999.700	PWK	1 laporan	79.988.400	11.300	99,99 %	

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2023

						Kabupaten/Kota									
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	PWK	8 laporan	374.861.000	PWK	8 laporan	316.466.500	58.394.500	84,42 %
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	PWK	12 laporan	49.800.500	PWK	9 laporan	40.940.500	8.860.000	82,21 %
2	15	02	2	08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				250.045.100	PWK		236.787.600	13.257.500	94,70 %
2	15	02	2	08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Laporan Auditor dan Inspektur LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	PWK	23 laporan	50.000.000	PWK	23 laporan	50.000.000	0	100 %
2	15	02	2	08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	PWK	1 laporan	75.000.000	PWK	1 laporan	74.480.000	520.000	99,31 %
2	15	02	2	08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	PWK	1 laporan	25.000.000	PWK	1 laporan	25.000.000	0	100 %
2	15	02	2	08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	PWK	1 laporan	50.044.800	PWK	1 laporan	50.044.800	0	100 %
2	15	02	2	08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	PWK	12 laporan	50.000.300	PWK	9 laporan	37.262.800	12.737.500	74,53 %
2	15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				386.000.100	PWK		184.200.100	201.800.000	47,72 %
2	15	02	2	09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota tersedia	PWK	1 paket	350.000.100	PWK	1 paket	148.200.100	201.800.000	42,34 %
2	15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	PWK	30 laporan	36.000.000	PWK	30 laporan	36.000.000	0	100 %

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 Dinas Perhubungan menyusun Program dan Kegiatan untuk Parsial Rencana Kerja yang terdiri dari 3 Program dan 19 Kegiatan 56 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.630.625.498,- dengan rincian indikasi Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - d. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
 - g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.
 - h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.
 - i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Rencana Program dan Kegiatan dengan anggaran pada perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
MATRIKS RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

KODE						PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR (sesuai RPJMD dan DPA)	APBD MURNI (sesuai DPA)			PERUBAHAN TAHUN 2023		SELISIH		PERANGKAT DAERAH	
								Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	%		
1						2	3	4	5	6	7	8	9=(6-8)	10	11	
2	15					DINAS PERHUBUNGAN					28.024.752.638		28.396.549.443		1,01%	
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.981.156.838		19.231.443.738		1,01%	
2	15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					49.827.700		42.075.700	7.752.000		
2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun	PWK	100%	13.735.900	100%	10.575.900	3.160.000	0,77 %		
2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PWK	100%	9.999.700	100%	8.411.700	1.588.000	0,84 %		
2	15	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PWK	100%	9.973.900	100%	8.377.900	1.596.000	0,84 %		
2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	100%	9.924.000	100%	9.924.000	0	0%		
2	15	01	2	01	07	Evaluasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	PWK	100%	6.194.200	100%	4.786.200	1.408.000	0,77 %		
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.904.919.007		10.904.919.007		0%	
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Jumlah Gaji dan tunjangan ASN	PWK	100%	10.894.970.707	100%	10.894.970.707	0	0%		
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tersedia	PWK	100%	9.948.300	100%	9.948.300	0	0%		
2	15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.358.400		10.358.400		0%	

2	15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PWK	100%	10.358.400	100%	10.358.400	0	0%
2	15	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					364.640.000		364.640.000		0%
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PWK	100%	249.700.000	100%	249.700.000	0	0%
2	15	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	PWK	100%	24.940.000	100%	24.940.000	0	0%
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PWK	100%	90.000.000	100%	90.000.000	0	0%
2	15	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					912.152.634		1.063.719.200	151.566.566	12,66%
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	PWK	100%	25.873.600	100%	25.873.600	0	0%
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	PWK	100%	13.550.500	100%	13.550.500	0	0%
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	PWK	100%	49.999.500	100%	49.999.500	0	0%
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik	PWK	100%	517.193.034	100%	653.900.600	136.707.566	1,26 %
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan pengandaan	PWK	100%	100.000.000	100%	120.000.000	20.000.000	1,2 %
2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PWK	100%	14.400.000	100%	14.400.000	0	0%
2	15	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	PWK	100%	25.141.000	100%	0	25.141.000	0%
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PWK	100%	124.995.000	100%	144.995.000	20.000.000	1,16 %
2	15	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PWK	100%	25.000.000	100%	25.000.000	0	0%
2	15	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah menu/fitur sistem	PWK	100%	16.000.000	100%	16.000.000	0	0%

2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	PWK	100%	420.116.000	100%	299.728.905	120.387.95	0,71 %
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				5.605.207.100		5.605.207.100		0%
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	PWK	100%	254.420.000	100%	254.420.000	0	0%
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	PWK	100%	5.183.804.600	100%	5.183.804.600	0	0%
2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	PWK	100%	166.982.500	100%	166.982.500	0	0%
2	15	02	2	03		Pengelola Terminal Penumpang Tipe C				113.630.000		263.630.000	150.000.000	2,32 %
2	15	02	2	03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		PWK	100%	0	100%	150.000.000	150.000.000	0%
2	15	02	2	03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan SDM Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	PWK	100%	113.630.000	100%	113.630.000	0	0%
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				199.999.400		199.999.400		0%
2	15	02	2	04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik	PWK	100%	119.999.700	100%	119.999.700	0	0%
2	15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelayanan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelayanan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	PWK	100%	79.999.700	100%	79.999.700	0	0%
2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				309.999.000		309.999.000		0%

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta 2023

2	15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	PWK	100%	159.999.300	100%	209.999.300	50.000.000	0%
2	15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		PWK	100%	0	100%	7.000.000	7.000.000	0%
2	15	02	2	05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		PWK	100%	0	100%	5.500.000	5.500.000	0%
2	15	02	2	05	04	Penyediaan Bukti Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tersedia	PWK	100%	69.999.700	100%	7.499.700	62.500.000	%
2	15	02	2	05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terpelihara	PWK	100%	80.000.000	100%	80.000.000	0	0,11 %
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.233.801.700		1.520.498.700	286.697.000	1,23%
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PWK	100%	49.899.000	100%	49.899.000	0	0%
2	15	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	PWK	100%	38.903.000	100%	0	38.903.000	0%
2	15	02	2	06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	PWK	100%	1.120.000.000	100%	1.445.600.000	325.600.000	1,29 %
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	PWK	100%	24.999.700	100%	24.999.700	0	0%
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				424.661.500		429.681.500	5.200.000	1,01 %
2	15	02	2	07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian	PWK	100%	374.861.000	100%	373.261.000	1.600.000	1 %

						(satu) Kabupaten/Kota	Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN				100.135.900		100.135.900		0%
2	15	03	2	06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota				50.135.900		50.1353.900		0%
2	15	03	2	06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	PWK	100%	50.135.900	100%	50.135.900		0%
2	15	03	2	13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				50.000.000		50.000.000		0%
2	15	03	2	13	04	Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	PWK	100%	50.000.000	100%	50.000.000		0%

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dengan Renja Murni Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Parsial Renja ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat di Dinas Perhubungan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini agar dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen ini.

Purwakarta, 13 Oktober 2023



R. IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST, MM
NIP.19720228 200312 1 003

